

STRATEGI MENGEFEKTIFKAN GAPOKTAN SEBAGAI LEMBAGA EKONOMI DIPERDESAAN

Abdullah Usman

Mahasiswa S3 EPN SPs IPB Bogor, dosen Agribisnis Universitas
Mataram

ABSTRACT

Farmers group union (Gapoktan) can be perceived as a breakthrough to enhance farmer's bargaining position in market both output market, input market and money market. This issue is getting relevant especially in liberalisation era. Such institution is extremely important to shield farmers and informal sectors from modern sector's invasion. Farmer's weak position in global competition can be the cause of why modern retail like Alfamart which has been partly owned by Carrefour dominates the outlet of agribusiness products. This paper attempts to highlight some thoughts related to strategy to improve the union to be more effective. This descriptive study uses qualitative data and information, presented to encourage scientific discussion. After doing overviewing union concept, this paper attempts to raise theoretical foundation to evaluate the union. By then, it can be evaluate the position of current union, understanding the problems and their solutions. The union can be studied using public good theory, market structure, market separation and price discrimination, market information, producer behaviour. To enhance effectiveness of the union can use the strategy concern to bottom up initial establishing, and by maintaining conducive business climate.

ABSTRAK

Gabungan kelompok tani (Gapoktan) bisa dipandang sebagai terobosan usaha untuk memperkuat posisi rebut tawar (bargaining position) petani dipasar. Isyu ini semakin relevan dikaji terutama dalam konteks liberalisasi perdagangan dan membentengi usaha lokal dalam persaingan global dengan menggunakan kelembagaan modern seperti ritel alfamart yang sekarang sebagian sahamnya sudah diacquisisi oleh Carrefour, yang membuat pengusaha lokal semakin terpinggirkan. Paper ini berupaya menelaah beberapa kemungkinan strategi didalam mengefektifkan gapoktan yang selama ini masih belum terasa peranannya. Kajian ini bersifat diskriptif dengan menggunakan data dan informasi kualitatif yang dikemas dalam format diskusi ilmiah. Paper ini menyoroti (overview) gapoktan dan mencari landasan teoritisnya sebagai acuan

dalam pengkajian. Empirik dilapangan dievaluasi dengan teoritis sehingga bisa dipahami posisi pelaksanaan gapoktan, masalah dan solusinya. Gapoktan dapat dikaji dengan menggunakan teori public good, struktur pasar, market separation dan price discrimination, informasi pasar, dan perilaku produsen. Untuk meningkatkan efektifitas gapoktan bisa digunakan strategi pembentukan yang bottom up dan strategi membangun iklim usaha yang kondusif.

Key words: farmer group union, strategy, market

Kata kunci: gabungan kelompok tani (Gapoktan), strategy, pasar

Latar belakang

Memasuki era perdagangan bebas kawasan Asia Cina, ACFTA (Asean Cina Free Trade Area), masalah rendahnya daya saing produk petani semakin serius, baik dari sisi mutu (quality), jumlah (quantity) dan sisi keajegan (kontinuitas) produksi. Keadaan semakin diperburuk oleh adanya acquisisi (pembelian) sebagian saham perusahaan ritel PT Alfa Retailindo Tbk oleh Carrefour sehingga Alfa Mart tumbuh semakin banyak, menjamah semua lini/daerah konsumen sehingga bisa dikatakan tidak tersisakan pangsa konsumen untuk toko kecil, kios dan pasar rakyat. Produk produk yang dipasarkan oleh ritel tersebut adalah hasil buatan industri maju dan produk impor yang sudah melakukan standarisasi dengan kemasan modern yang memenuhi syarat untuk dipajang di pasar modern. Pemasarannya dilakukan dengan memenuhi kaidah manajemen modern dengan meletakkan pembeli sebagai raja dengan memperhatikan kenyamanan berbelanja dengan harga yang terjangkau. Ditambah lagi dengan upaya upaya khusus untuk mempromosikan produk baru, atau lokasi baru sehingga timbul kesan bahwa berbelanja di minimarket dan ritel sejenis lebih berdaya saing dari pada pasar rakyat. Paparan diatas mengedepankan betapa tidak berimbangnnya daya saing antara produk dan pengusaha lokal yang umumnya dihasilkan oleh petani dengan lembaga pertaniannya dengan produk modern/impor.

Di sisi lain, sebagian besar produk pertanian, dan agroindustri di Indonesia masih ketinggalan teknologinya dibandingkan dengan Thailan, China dan Korea Selatan. Hal ini ada kaitannya dengan kondisi ukuran usahatani di Indonesia yang kecil (rata rata 0.33 ha per petani) dan mutu SDM pertanian yang belum memadai. Akibatnya, produk pertanian yang dihasilkan masing masing individu petani sangat sedikit, jauh dari memenuhi syarat skala ekonomis. Selain itu, mutu juga sulit di jamin karena dikelola oleh banyak tangan dengan teknologi yang tidak seragam, demikian juga dengan kontinuitas produksi sulit untuk dijamin karena masing masing petani memiliki hak untuk memutuskan jenis usahanya yang sesuai dengan pertimbangannya.

Jauh sebelum ACFTA diluncurkan Januari 2010, pemerintah Indonesia sudah mengantisipasi keadaan yang akan dihadapi terutama yang berkaitan dengan lemahnya daya saing produk Indonesia di kancah pasar

dunia. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memperkuat kelembagaan petani antara lain dengan pembentukan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang sudah dilakukan sejak awal tahun 1990an. Keberadaan Gapoktan menjadi lebih diperkuat posisinya dengan dikeluarkannya kebijakan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (RPPK) 2005-2025 dan juga Undang Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Badan Litbang Pertanian, 2005). Pembentukan Gapoktan pada dasarnya didorong oleh keadaan dimana petani mengalami kesulitan dalam akses pasar baik pasar input dan pasar tenaga kerja maupun pasar output, lemah terhadap lembaga keuangan, juga terhadap lembaga penyedia sarana produksi pertanian, serta terhadap sumber informasi.

Syahyuti (2005) melakukan kajian secara kritis kebijakan Gapoktan dan mengidentifikasi sejumlah hambatan dan tantangan dalam pengembangan kelembagaan. Dikedepankannya bahwa kesalahan umum yang terjadi dalam pengembangan kelembagaan adalah (1) Kelembagaan yang dibangun belum cukup handal karena hanya memperkuat ikatan-ikatan horizontal, bukan ikatan vertikal; (2) pembentukannya lebih dititikberatkan untuk tujuan distribusi bantuan dan memudahkan tugas kontrol bagi pelaksana program (3) Kelembagaan yang dibentuk tidak gunakan secara efektif terutama dalam pembinaan dimana terjadi kecenderungan pembinaan secara individual, yaitu hanya kepada pengurus; (4) Pengembangan kelembagaan mengandalkan jalur struktural, sedangkan aspek kulturalnya sangat lemah.

Walaupun Gapoktan sudah hampir berusia sekitar 10 tahun, namun fakta menunjukan bahwa daya saing produk domestik termasuk pelaku usaha kecil dan menengah tidak mengalami kemajuan. Kehadiran hypermarket mematikan banyak pasar tradisional dimana produk Gapoktan banyak dipasarkan disitu. Sejumlah produk hasil dari home industri atau individu petani yang mencoba dan berupaya untuk mendapatkan kesempatan memasarkan produknya di pasar ritel modern seperti minimarket, supermarket apalagi hypermarket lebih banyak terkesan sebagai 'belas kasihan', sekedar untuk mengindahkan aturan, atau upaya perusahaan untuk meredam penilaian publik yang negatif sekaligus memunculkan kesan positif bahwa perusahaan itu telah melibatkan dan memperdulikan pembangunan 'wong cilik'. Prilaku dan sikap yang demikian masih jauh dari prinsip kerja sama win win solution, sebagai syarat sustainnnya kemitraan.

Karena sifatnya yang demikian, maka pemutusan kerjasama bisa saja terjadi kapan saja bila muncul hal hal yang kurang mendukung terjalannya kerjasama misal jika produk yang dihasilkan Gapoktan dan anggotanya tidak memenuhi persyaratan mutu ritel dan karenanya meninggalkan dampak negatif pada ritel akan rendahnya mutu barang yang dijualnya. Akibatnya, sejumlah unit usaha kecil dan menengah mengalami kebangkrutan, setiap tahun terdapat delapan pasar tradisional dan 400 kios terpaksa tutup karena kalah bersaing dengan hipermarket dan pasar modern lainnya yang berwujud minimarket-

minimarket (Mathari, 2008). Demikian juga, dipasar input (termasuk pasar tenaga kerja) dan pasar uang (kredit) dan pasar technology, Gapoktan dan anggotanya, belum mampu memainkan peran yang meningkatkan posisi rebut tawar (bargaining position) sebagaimana merupakan tujuan utama pembentukan Gapoktan.

Paper ini menyandingkan Gapoktan dengan ritel modern seperti alfa mart, sebagai dua agen yang saat ini bersaing, satu mengalahkan yang lain. Masalah yang disoroti adalah bahwa keberadaan Gapoktan belum mampu menjadi wadah kelembagaan petani perdesaan yang memberikan peluang untuk meningkatkan daya saing petani di pasar baik di pasar output dimana petani melakukan pemasaran hasil produksi maupun di pasar input dimana petani membeli bahan dan input pertanian serta di pasar uang dimana Gapoktan dan petani anggotanya mendapatkan kredit untuk pendanaan kegiatannya sehingga mampu membeli teknologi produksi yang digunakan dalam proses produksi sehingga mampu menghasilkan produk yang memenuhi standar mutu yang ditentukan pasar ritel modern, juga didalam mendapatkan teknologi dan manajemen pemasaran sehingga produk Gapoktan bisa bersaing di pasar global dan terbuka.

Paper ini mengelaborasi kemungkinan terbentuknya jalinan kerjasama yang memenuhi prinsip win win condition antara kedua lembaga tersebut, Gapoktan sebagai representasi usaha tradisional dan ritel modern (sejenis alfa mart) sebagai representasi usaha modern, atau kemungkinan lain yang dinilai tepat dilakukan Gapoktan untuk mempertahankan keberadaan sebagai lembaga ekonomi perdesaan atau bahkan mengembangkannya, dengan kata lain perlu penciptaan iklim usaha yang kondusif agar para pelaku ekonomi dalam spektrum yang luas masing masing memiliki ruang gerak, tidak saling mematikan satu sama lain.

Secara spesifik, paper ini bertujuan untuk:

- Menyoroti kebijakan Gapoktan secara umum (overview) dengan penekanan pada aspek yang dinilai berpotensi sebagai sebab gagalnya Gapoktan dalam memainkan perannya sebagai lembaga ekonomi perdesaan. Untuk itu dilakukan inventarisir global aspek aspek (variabel) yang yang dinilai mempengaruhi performa Gapoktan sebagai lembaga ekonomi perdesaan.
- Melakukan expert judgment secara kualitatif teoritis faktor faktor yang perlu dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan efektifitas kebijakan Gapoktan, dan menawarkan alternatif solusi dan langkah praktis implementatif didalam meningkatkan kinerja Gapoktan.

Over view Gapoktan

Gabungan Kelompok Tani atau GAPOKTAN adalah gabungan dari beberapa kelompok tani yang melakukan usaha agribisnis di atas prinsip kebersamaan dan kemitraan sehingga mencapai peningkatan produksi dan

pendapatan usahatani bagi anggotanya dan petani lainnya. Tujuan utama pembentukan dan penguatan Gapoktan adalah untuk memperkuat kelembagaan petani yang ada, sehingga pembinaan pemerintah kepada petani akan terfokus dengan sasaran yang jelas (Deptan, 2006).

Gapoktan dibentuk sebagai wadah kerja antar kelompok dan dibedakan dengan asosiasi petani dan nelayan yang sudah memiliki satu atau lebih usaha secara komersial. Gapoktan merupakan suatu proses lanjut dari lembaga petani yang sudah berjalan baik, misalnya kelompok-kelompok tani, dan diposisikan sebagai institusi yang mengkoordinasi lembaga-lembaga fungsional di bawahnya. Selain Gapoktan, kelembagaan pertanian yang lain meliputi kelembagaan penyuluhan (BPP), Koperasi tani (Koptan), penangkar benih, pengusaha benih, institusi perbenihan lainnya, kios, KUD, pasar desa, pedagang, asosiasi petani, asosiasi industri olahan, asosiasi benih, P3A, UPJA dan lain-lain yang memerlukan jaringan kerjasama untuk meningkatkan kinerja organisasi sehingga terjadi sinergis yang tinggi. Gapoktan adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha (Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 16/Permentan/OT.140/2/2008)

Gapoktan merupakan kelembagaan tani pelaksana PUAP untuk penyaluran bantuan modal usaha bagi anggota. Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pelaksanaan PUAP, Gapoktan didampingi oleh tenaga Penyuluh Pendamping dan Penyelia Mitra Tani. Gapoktan PUAP diharapkan dapat menjadi kelembagaan ekonomi yang dimiliki dan dikelola petani. Dari sisi perannya, kelembagaan pertanian dibedakan atas lembaga pengelolaan sumberdaya alam (misalnya P3A), untuk tujuan aktivitas kolektif (kelompok kerja *sambat sinambat*), untuk pengembangan usaha (KUA dan koperasi), untuk melayani kebutuhan informasi (kelompok Pencapir), untuk tujuan representatif politik (HKTI)

Gagasan pembentukan Gapoktan didorong oleh adanya kemauan politik dan pemerintah untuk meningkatkan posisi rebut tawar (*bargaining position*) petani di pasar output, pasar input dan tenaga kerja, dan pasar uang (kredit). Pada pasar uang, petani secara individu sulit untuk mendapatkan akses kredit untuk mendapatkan dana segar yang akan digunakan untuk mengelola usahanya secara profesional agar bisa menghasilkan produk yang bermutu. Tingginya resiko dalam usaha pertanian dan agribisnis merupakan salah satu penyebab rendahnya akses kredit yang didapatkan petani. Lembaga keuangan yang ada enggan untuk melayani dan mengucurkan kredit kepada petani karena risikonya yang tinggi dimana penyelenggaraan kegiatan pertanian dan usahatani masih sangat rentan dengan pengaruh alam dan perubahan iklim yang belum sepenuhnya belum bisa dimanipulasi teknologi, sehingga tidak ada jaminan bahwa usaha pertanian yang dilakukan akan membuahkan hasil sesuai dengan rencana. Sebagai lembaga keuangan yang mencari profit, maka pengucuran dana kreditnya harus melibatkan pertimbangan risiko pengembalian

kredit dan untuk itu diperlukan jaminan/agunana/collateral dimana sebagian besar petani tidak memilikinya.

Pembentukan Gapoktan dimaksudkan untuk menangani masalah itu. Kelompok tani, koperasi, dan Kelompok Usaha Agribisnis merupakan kelembagaan yang khusus untuk kegiatan ekonomi perdesaan. Gapoktan pada hakekatnya bukanlah lembaga dengan fungsi yang baru sama sekali, namun hanyalah lembaga yang dapat dipilih (opsi) di samping lembaga-lembaga lain yang juga terlibat dalam aktivitas ekonomi secara langsung. Selama ini, kelembagaan telah dijadikan alat yang penting untuk menjalankan sebuah program (

Peran pokok Gapoktan dapat di bedakan atas tiga macam (1) difungsikan sebagai lembaga sentral dalam sistem yang terbangun, misalnya terlibat dalam penyaluran benih bersubsidi; (2) dibebankan untuk peningkatan ketahanan pangan di tingkat lokal melalui pembimbingan kelompok tani (3) dianggap sebagai Lembaga Usaha Ekonomi Perdesaan (LUEP) sehingga dapat menerima Dana Penguatan Modal (DPM) sejak tahun 2007 walaupun kegiatan DPM sendiri dimulai semenjak tahun 2003 (Syahyuti, 2005).

Deptan membenahi kelembagaan penyuluhan antara lain berupa bantuan sewa/kontrak bagi 1698 BPP, pengembangan 88 BPP Model di 6 Propinsi RPPK, serta penguatan kelompok tani dan pengembangan koperasi tani (Badan SDM Pertanian, 2006). Selain itu, akan dilakukan pengangkatan 3.000 tenaga penyuluh pertanian honorer¹, semuanya itu dimaksudkan untuk meningkatkan peran lembaga pertanian termasuk yang berkaitan dengan transfer informasi teknologi pertanian dan informasi pasar.

Pada tahun 2006 dilakukan pendataan profile kelompok tani, dan hasilnya ditindaklanjuti tahun 2007 dalam bentuk pelatihan, pembinaan dan pemberdayaan sehingga kelompok menjadi lebih siap untuk mengikuti dan melaksanakan program. Dengan adanya wadah ini, maka evaluasi capaian program dilakukan melalui Gapoktan yang keberadaannya akan senantiasa dibina dan dikawal hingga menjadi lembaga usaha yang mandiri, profesional dan memiliki jaringan kerja luas.

Dasar Teoritis dan Assessment

Dasar teoritis yang disajikan berikut dimaksudkan untuk mengkaji secara teoritis performa dari Gapoktan, kinerja dan kemungkinan pencapaian tujuan

¹ komunikasi langsung dengan pejabat Deptan 10/12/09, program ini mengalami stagnasi karena tenaga kontrak yang direkrut menuntut untuk diangkat menjadi pegawai negeri, tidak sesuai dengan isi kontrak

lembaga. Dengan membandingkan teori dengan realitas implementasi dilapangan maka bisa dinilai performa dan efektifitas kebijakan yang dibuat. Dasar teoritis yang disajikan mencakup: teori barang publik (public good), teori struktur pasar, dan teori perilaku produsen.

Public good

Kajian Gapoktan bisa didekati dengan memandang Gapoktan sebagai barang publik (public goods). Hal ini bisa dimengerti karena Gapoktan merupakan media (wadah) yang menghimpun sejumlah kelompok tani (poktan) yang didalamnya terdapat banyak individu petani. Tindakan Gapoktan bersifat kolektif dan pengambilan keputusannya dilakukan oleh pengurus inti sebagai perwakilan dan penjelmaan dari seluruh anggota baik melalui asas musyawarah untuk mufakat, maupun melalui voting. Didalam mekanisme ini, dimungkinkan hadirnya 'free rider' yaitu individu yang mengambil manfaat tanpa memberikan kontribusi. Penyusunan proposal dan rencana kegiatan termasuk pengajuan kredit dilakukan oleh sebagian orang (pengurus, mungkin dibantu anggota) untuk dinikmati oleh seluruh elemen gapoktan, baik pengurus maupun anggota.

Myles (2001) membedakan barang publik atas 2 macam: Barang publik murni (pure publik goods) dan barang publik tidak murni (impure). Jika terjadi penambahan pengguna menyebabkan terjadinya penurunan kepuasan pengguna yang sudah ada sebelumnya, maka tergolong barang publik tidak murni dan sebaliknya. Myles juga membedakan barang publik atas barang (1) non-excludability dan (2) non-rivalry good. Yang pertama dicirikan oleh keadaan dimana penggunaan barang publik itu tidak bisa dikecualikan, semua orang bisa menikmati, tidak ada tambahan biaya untuk melayani tambahan satu pengguna. Yang kedua dicirikan oleh konsumsi oleh rumah tangga/individu tidak akan menyebabkan berkurangnya barang tersebut untuk kepentingan orang lain.

Selain itu isu free rider dalam Gapoktan adalah suatu hal yang sulit dihindari. Dalam pengambilan keputusan kolektif, ketua kelompok bertindak mewakili anggotanya dalam pengambilan keputusan. Anggota kelompok menyerahkan haknya dan mendelegasikan haknya untuk pengambilan keputusan yang berkaitan dengan hak dirinya yang mekanisme dilakukan melalui kelompok dan Gapoktan. Keputusan yang diambil oleh ketua Gapoktan bisa saja melalui mekanisme musyawarah dengan menghadirkan anggota. Dalam keadaan bahwa musyawarah itu dihadiri oleh semua anggota kelompok, pengambilan keputusan didengar dan disaksikan oleh semua anggota kelompok, tetapi tidak berarti keputusan itu merupakan kemauan semua anggota, terutama kalau musyawarah itu berakhir dengan voting, pengambilan keputusan dengan memilih suara terbanyak. Dalam hal ini suara yang kalah mestinya tidak mengeluarkan diri dari keputusan itu, namun secara naluriah, maka kelompok yang kalah ini tidak merasa memiliki keputusan itu dan karenanya tidak memiliki

rasa kewajiban untuk mendukung dan menyukseskannya. Walaupun keputusan sudah bersifat demokratis, namun pada tataran pelaksanaan sehari-hari banyak ditentukan oleh keputusan individu yang tidak selalu sesuai dengan keputusan kolektif. Kalaupun kelompok yang kalah dalam voting ini mau berpartisipasi, biasanya hanya sebatas formalitas saja, tidak datang dari dalam hati. Selain itu, keputusan individu juga dipengaruhi oleh informasi dan keyakinan yang dimilikinya sehingga mengalahkan keputusan kolektif. Sebagai contoh, secara kolektif diputuskan bahwa dana revolving yang diterima harus digulirkan ke anggota lain, namun karena dipengaruhi oleh pemikiran yang menganggap bahwa uang pinjaman pemerintah tidak mesti dikembalikan, maka terjadilah kemacetan dana terutama dalam program yang berkaitan dengan dana revolving.

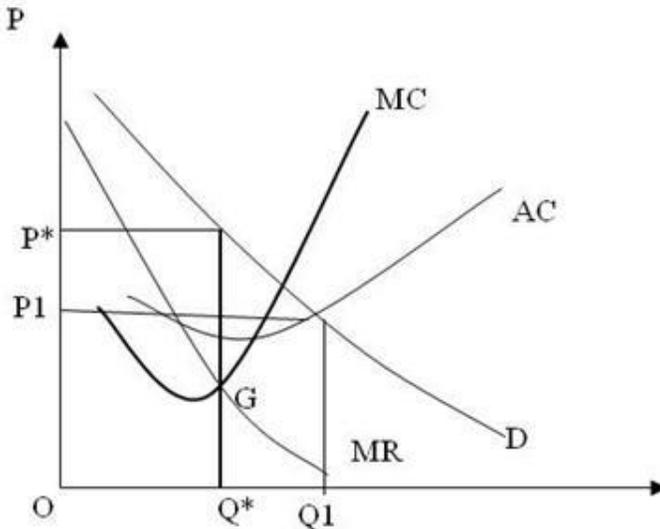
Seperti sudah disinggung sebelumnya bahwa Gapoktan merupakan aksi kolektif sejumlah kelompok tani, masing-masing kelompok tani berisi individu petani yang memiliki perbedaan latar belakang dan kepentingan. Walaupun diupayakan dalam satu kelompok terkumpul petani yang memiliki kepentingan yang sama, namun secara utuh, petani memiliki peran dan kewajiban lain diluar peran yang berkaitan dengan kelompok. Sebagai contoh, Petani A dan petani B dari kelompok tani yang sama, yang mengusahakan padi sawah, bisa memiliki kepentingan yang sama dalam hal mendapatkan benih padi unggul, pupuk, dan pestisida berkaitan dengan kebutuhannya dalam penyelenggaraan usahatani padi sawah. Namun petani A dan petani B bisa berbeda dalam banyak hal berkaitan dengan kebutuhan hidupnya, yang mempengaruhi mereka dalam berperilaku dan dalam pengambilan keputusan individu dan rumahtangganya. Petani A dengan anak yang sudah masuk kuliah, membutuhkan banyak uang untuk mencukupi kebutuhan rumahtangganya dibanding petani B yang anaknya baru SD, misal. Perbedaan keadaan ini menyebabkan berbedanya mereka dalam bertindak dan mengambil keputusan. Kredit macet yang disalurkan lewat Gapoktan kelak bisa dijelaskan karena keadaan ini. Petani B dengan anaknya yang mahasiswa, bisa saja menggunakan dana yang semestinya untuk melunasi kreditnya, tetapi tidak dilakukannya karena uangnya digunakan dulu untuk melunasi spp anaknya. Hal ini menjadi penting di dalam melakukan pengawasan dan pembinaan, dan tidak bijak kalau di perlakukan sama untuk kasus yang berbeda. Inilah alasan lain kenapa pembentukan Gapoktan yang bottom up menjadi penting untuk menyerap sebanyak mungkin faktor faktor (variabel) yang mempengaruhi efektifitas kegiatan Gapoktan .

Preferensi setiap individu dalam mengkonsumsi jasa barang publik dan kesediaan konsumen membayar kompensasi kepada pihak penyedia produk merupakan indikator kunci dalam pembuatan keputusan penyediaan barang publik tersebut (Delis A, 2008). Hal ini berkaitan dengan besarnya iuran yang dibebankan ke anggota, dikaitkan dengan jasa yang didapatnya dari Gapoktan. Pemikiran ini relevan untuk dihubungkan dengan upaya menciptakan kondisi yang bisa membuat Gapoktan tetap bertahan. Sejauh ini, anggota tertarik untuk

menjadi anggota Gapoktan karena adanya alokasi dana bantuan terutama yang berkaitan dengan bantuan pupuk bersubsidi dan bantuan kredit usaha, yang hanya bisa didapat aksesnya kalau masuk menjadi anggotya Gapoktan, berarti jika bantuan tersebut sudah tidak ada, maka hilanglah daya tarik petani untuk menjadi anggota Gapoktan, selesai proyek, selesai kegiatan.

Struktur Pasar

Di dalam membeli input pertanian (seperti pupuk, pestisida) dan alat mesin pertanian (alsintan), petani secara individu sebagai elemen terkecil Gapoktan berhadapan dengan pasar monopoli (satu penjual). Keputusan seorang monopolis mengacu pada keseimbangan dimana marginal revenue (MR) sama dengan marginal cost (MC)



Gambar 1. Keputusan Monopolis

Gambar 1 menunjukkan bahwa keseimbangan monopolis dicapai pada titik Gapoktan ($MR=MC$).

Dengan acuan itu, monopolis menetapkan harga unit sebesar P^* dengan jumlah yang dijual sebanyak Q^* . Inilah eksploitasi yang dialami oleh petani secara individu, mereka akan membeli dengan harga yang lebih mahal, dengan jumlah transaksi yang lebih sedikit.

Jika pasarnya bersaing, maka penetapan harganya mengacu pada prinsip Marginal cost (supply) sama dengan demand ($MC=D$), sehingga harga yang ditetapkan lebih murah dari harga monopolis yaitu setinggi $P1$ dengan jumlah transaksi lebih banyak yaitu sebesar $Q1$ (Gambar 1).

Di pasar uang, petani juga berhadapan dengan pasar monopoli, dimana petani bertindak sebagai price taker, tingkat bunga kredit ditentukan oleh kreditor. Bahkan pasar uang lebih rumit lagi karena bukan saja masalah bunga yang ditetapkan sepihak, tetapi juga syarat cairnya kredit ditentukan sepihak oleh pihak bank sehingga petani yang tidak mampu memenuhi syarat (seperti harus memiliki collateral) yang ditentukan tidak akan dapat kredit.

Dengan konsep pembentukan Gapoktan maka monopolis pada pasar input akan berhadapan dengan monopsoni (satu pembeli) yaitu Gapoktan, artinya petani dihimpun dalam satu kekuatan Gapoktan seolah olah menjadi satu pembeli tunggal input (monopsoni), sehingga memiliki kekuatan di dalam menentukan harga beli input, yang lebih rendah dari harga jual yang ditentukan oleh monopoli. Gap harga yang ditentukan monopoli dan yang ditentukan monopsoni merupakan arena saling tawar menawar (bargaining) toko supplier input dengan petani (Gapoktan) dan harga yang disepakati tergantung pada kekuatan posisi masing masing.

Market Separation dan Price Discrimination

Dalam menjalankan perannya menyalurkan pupuk urea bersubsidi untuk tanaman pangan, efektifitas pelaksanaan fungsi Gapoktan dapat dikaji dengan menggunakan konsep Market Separation dan Price Discrimination, dimana harga pupuk urea bersubsidi untuk tanaman pangan lebih murah dari pupuk urea untuk tanaman non pangan. Kebijakan pupuk bersubsidi yang disalurkan oleh Gapoktan kurang efektif (tidak mengenai sasaran yang ditargetkan), bukan semata karena masalah Gapoktan, melainkan juga kelemahan dari sisi substansi kebijakan paling tidak ditinjau dari sudut teoritis.

Kebijakan subsidi pupuk untuk tanaman pangan, secara teoritis bisa ditelaah menggunakan teori pasar dengan diskriminasi harga, yaitu harga dengan subsidi dan harga tanpa subsidi. Pasar dengan diskriminasi harga akan efektif berjalan jika dipenuhi tiga syarat: (1) elastisitas demand produk tersebut berbeda antara pasar satu dengan pasar lainnya; (2) tidak terjadi penjualan kembali (resell) atas produk tersebut dan (3) terdapat pencari/pembeda antara produk yang dijual di pasar A dengan di pasar B (Nicholson, 2007).

Ketiga syarat tersebut tidak terpenuhi dalam implemenetasinya. Pupuk urea yang disubsidi tidak dibedakan secara substantial, walaupun kemasan luarnya dibubuhi label pupuk bersubsidi. Akibatnya, resell terjadi dengan mudah bahkan sudah ada yang ijon kan sebelum pupuknya sampai ke lokasi, guna mendapatkan dana tunai untuk memenuhi kebutuhannya yang mendesak. Hal ini bisa dimengerti terutama kalau dihubungkan dengan keadaan dimana

pengawasan (kontrol) pelaksanaan kebijakan yang lemah. Keadaan ini sulit untuk ditanggulangi, karena walaupun petani diancam untuk tidak diberi pupuk bersubsidi, mereka juga tidak terlalu bergeming, berubah sikapnya, karena memang kebijakan ini bukan inisiatif mereka. Mereka tidak merasa memiliki dan merasa perlu mengamankan kebijakan itu.

Dari sisi kebijakan subsidi pupuk itu sendiri terkandung kelemahan substansial yang bisa dikaji secara teoritis. Pertama, subsidi pupuk diberikan kepada pabrik pupuk agar mereka bisa menjual dengan harga lebih murah dari harga pasar. Secara implisit, praktek ini mengandung dua hal: adanya jaminan pasar pupuk bagi pabrik pupuk, dan jaminan harga yang disepakati bersama pemerintah. Akibatnya adalah bahwa tidak cukup kuat dorongan bagi pabrik untuk mencari dan melakukan terobosan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan menekan biaya produksi, sehingga pupuk bisa dijual dengan harga lebih murah. Bahkan disinyalir bahwa pihak pabrik menggunakan harga yang mahal sebagai angka yang diajukannya ke pemerintah. DPR menolak usulan subsidi pupuk 7 triliun untuk tahun 2008, karena dinilai terlalu tinggi perhitungan biaya produksi dan distribusinya²

Berkaitan dengan cara pemberian subsidi pupuk, ide yang ditawarkan adalah suatu pemikiran yang berdampak ganda, selain bisa mendorong produsen pupuk untuk melakukan terobosan teknologi, petani juga bisa mendapatkan keringanan harga yang didapatnya melalui subsidi. Untuk itu, instrumen yang perlu dijajaki adalah kebijakan harga eceran pupuk tertinggi (HET) untuk pasar dalam negeri, sedangkan pasar ekspor diserahkan pada harga dunia yang berlaku. Pemberian subsidi tidak lagi diserahkan kepada pabrik tetapi ke petani sasaran melalui wadah Gapoktan . selajutnya perlu pemikiran yang mengarah kepada adanya jaminan bahwa kebijakan berjalan dengan efisien dan efektif, misalnya pemikiran kearah mekanisme pengawasan yang murah tetapi berdaya hasil.

Ditambahkan bahwa, para aparat petugas (agent) pelaksana kebijakan di lapangan memiliki target kerja kuantitatif untuk menyalurkan pupuk tersebut sampai ke sasarannya sesuai dengan rencana yang dibuat, yang dijadikan ukuran prestasi dan reputasi kerja petugas. Hal ini merupakan dilema bagi petugas karena kalau diperketat distribusinya (tidak diberi) karena salah sasaran, maka target kuantitatif tidak tercapai, sebaliknya kalau pencapaian target yang diutamakan, maka sebagian pupuk bersubsidi akan didapat oleh petani non pangan.

² Suara-Karya, 13 Juli 2007, Seputar-Indonesia 13 Juli 2007,

Informasi Pasar, Asimetris

Lemahnya posisi petani secara individu menyebabkan terjadinya double eksploitasi atas diri petani (Saragih, 1997). Hal ini dimungkinkan terjadi karena transfer informasi harga (pasar) bersifat asimetris dimana kenaikan harga di tingkat konsumen akhir ditransfer begitu lambat ke petani, sebaliknya penurunan harga pada tingkat konsumen akhir dengan serta merta disampaikan ke petani sehingga harga segera diturunkan ditingkat petani mengikuti penurunan harga ditingkat konsumen akhir. Demikian petani mengalami eksploitasi ganda dimana disaat kenaikan harga, petani tidak bisa menikmati kenaikan tersebut, sebaliknya jika terjadi penurunan harga, maka petanilah yang pertama kali memikulnya. Yang barusan terjadi pada pasar output, belum lagi eksploitasi yang dialami petani di pasar input.

Di pasar output petani cenderung berhadapan dengan pasar monopsoni/oligopsoni (satu atau beberapa pembeli), sedangkan di pasar input, petani berhadapan dengan struktur pasar monopoli/oligopoli (satu atau beberapa penjual). Dalam hal ini, perlu kebijakan kelembagaan pertanian untuk menekan dampak negatif dari praktek pasar yang tidak bersaing.

Produsen rational

Kalau Gapoktan dapat berperan sebagai wadah untuk meningkatkan efisiensi produksi, pemasaran dan manajemen, maka terdapat dorongan yang kuat bagi petani untuk bergabung menjadi anggota Gapoktan, tidak sebaliknya menghindari menjadi anggota kelompok seperti yang dialami oleh koperasi. Hal ini bisa dijelaskan secara teoritis dengan menggunakan konsep perilaku produsen.

Asumsi klasik yang umum digunakan dalam kajian perilaku produsen adalah bahwa produsen berperilaku rational, artinya produsen akan memanfaatkan setiap peluang untuk memaksimalkan keuntungan (profit maksimisasi), termasuk keputusan untuk penggunaan input modern dan teknologi diarahkan ke tujuan maksimisasi profit, termasuk juga untuk bergabung menjadi anggota Gapoktan .

Menggunakan alur berpikir demikian maka bisa dimengerti kenapa selama petani mengeluarkan biaya untuk membeli input pertanian maka mereka tidak berkepentingan memaksimalkan produksi fisik, melainkan berupaya untuk memaksimalkan keuntungan. Produksi fisik maksimum dicapai pada saat turunan pertama (first order condition, FOC) fungsi produksi disamakan dengan nol dengan kata lain produk marginal (PM) sama dengan nol, sedangkan untuk maksimisasi profit maka produk marjinal disamakan dengan ratio harga. Dalam hal kebijakan pemerintah ingin memaksimalkan produksi fisik, pemerintah bisa melakukannya dengan memberikan input gratis kepada petani sehingga ratio harga = nol,

dengan kata lain dicapai $PM=0$ yang merupakan kondisi yang harus dipenuhi agar produksi fisik mencapai titik maksimum.

Untuk memudahkan pemerintah dalam penyaluran input, maka kelompok tani dan Gapoktan bisa memainkan peranan penting dalam penyaluran tersebut. Yang sering menjadi masalah adalah data yang akurat untuk menjadi dasar penyaluran input tersebut. Kalau pendekatannya hamparan, tidak semua lahan dalam hamparan tersebut digunakan untuk mengusahakan tanaman yang sama sehingga perlu dibedakan inputnya. Kelemahan data, bisa menyebabkan terjadinya over estimasi atau under estimasi input yang diperlukan sehingga pelaksanaan usahatani dilapangan tidak optimal.

Strategi peningkatan efektifitas fungsi Gapoktan

Setelah memahami secara teoritis performa Gapoktan dan diperoleh sejumlah pelajaran dari sana, maka pemikiran selanjutnya adalah mencari cara dan strategis untuk meningkatkan efektifitas fungsi Gapoktan . beberapa pemikiran yang dikemukakan pada paper ini adalah yang berkaitan dengan pembentukan Gapoktan yang lebih efektif, dan berkaitan dengan iklim usaha (kegiatan) Gapoktan .

Pembentukan yang Bottom up

Organisasi (kelembagaan) yang dibentuk akan efektif didalam memainkan perannya sesuai dengan tujuan pembentukannya jika organisasi itu dilengkapi dengan piranti (instrumen) pelaksana dan pengawasan, tidak sekedar administrasi keanggotaan serta AD/ART statis. Piranti ini akan efektif jika terbangun motor penggerak baik pada tataran pengurus maupun pada tataran anggota. Berarti perlu adanya rasa memiliki (sense of belonging) yang akan bergerak sebagai faktor pendorong yang memunculkan rasa tanggung jawab segenap elemen lembaga didalam menjalankan fungsinya. Untuk itu, haruslah lembaga itu dibangun dari bawah oleh elemen terendah (individu petani) atas kesadaran yang mendasar akan pentingnya wadah kelembagaan tersebut sebagai media untuk menghimpun kekuatan guna meningkatkan posisi rebut tawar yang pada gilirannya akan menaikkan daya saing dan pendapatan petani. Inisiatif lokal sangat diperlukan dalam pembangunan perdesaan, baik dari sisi pemerintah maupun komunitas setempat Taylor dan Mckenzie (1992). Kemandirian lokal juga menegaskan bahwa organisasi seharusnya dikelola dengan lebih mengedepankan partisipasi dan dialog dibandingkan semangat pengendalian yang ketat sebagaimana dipraktekkan selama ini (Amien, 2005).

Literatur klasik mengedepankan dua orientasi dalam keputusan berproduksi yaitu orientasi pasar dan orientasi produk. Jika barangnya belum

punya, dan mau merencanakan produk apa yang mau dihasilkan, maka pertimbangannya adalah bahwa barang yang dihasilkan adalah barang yang dibutuhkan pasar, karena itu perlu survey pasar untuk mengenal kebutuhan pasar. Sebaliknya jika produknya sudah ada seperti tegakkan kayu dua banga di Hutan Calabai Dompu, maka dalam hal ini adalah tidak tepat mempertanyakan mau produk apa karena barangnya sudah ada. Pertanyaan yang relevan untuk kasus ini adalah bagaimana menjual kayu dua banga tersebut agar memberikan hasil yang optimal. Dalam hal ini orientasinya adalah orientasi produk, barangnya sudah ada.

Alur berpikir tersebut bisa digunakan secara asosiatif berkaitan dengan pemikiran menemukan strategis yang bisa meningkatkan efektifitas Gapoktan. Dalam konteks ini, barangnya (yaitu Gapoktan) diidentifikasi terlebih dahulu, apakah sudah ada atau belum. Jika sudah ada, maka pemikirannya adalah bisakah koperasi tersebut diberdayakan sehingga bisa memainkan fungsi sesuai dengan tujuan pembangunan. Pertanyaan yang muncul selanjutnya adalah, apakah biaya untuk memberdayakan koperasi dan juga Gapoktan lebih murah dibandingkan dengan melakukan pembentukan baru sama sekali? Jawaban atas pertanyaan itu bersifat subjektif dan kasuistis, tidak bisa digeneralisasi untuk semua.

Pemikiran ini sekaligus menepikan kebiasaan yang sering ditemui bahwa negara ini rajin membuat tetapi tidak cukup pandai memelihara. Kultur yang demikian tidak mendukung munculnya instrumen yang efektif. Dicontohkan bahwa Gedung besar yang belum lama selesai dibangun dan digunakan, ditumbuhi oleh lumut dan tidak terawat dengan baik³. Inilah kultur yang lemah di negeri ini, pandai membuat dan kurang pandai merawat termasuk di aspek kelembagaan sosial ekonomi, banyak bermunculan papan nama lembaga tetapi tidak nampak kegiatannya.

Kembali ke Gapoktan, agar Gapoktan tidak sekedar simbolis organisasi belaka, maka dalam tahap awal pembentukannya, perlu diinventarisir kasus per kasus masing masing daerah dan wilayah, apakah sudah memiliki wadah atau belum. Jika sudah, maka wadah yang ada diberdayakan/diremajakan sehingga pekerjaan tidak mulai dari nol.

Bagi masyarakat yang belum maju dan belum paham tentang oragnisasi, sulit dihindari pembentukan organisasi yang top down approach. Untuk tujuan pendidikan dan memberdayaan, maka pendekatan top down dilakukan bagi masyarakat tertinggal, sebagai triger sekaligus contoh kepada masyarakat yang belum memilki kemampuan manajerial didalam membangun lembaga. Pada prinsipnya, selama memungkinkan maka pendekatan bottom up dinilai lebih efektif. Setelah lembaga Gapoktan dibentuk, proses

³ Pengamatan langsung penulis pada sebuah gedung besar milik pemerintah di kawasan Indonsia Bagian Timur, tahun 1991

pendampingan pembinaan dan pengawasan yang bersifat mendidik dan mengkader masyarakat lokal terus dilakukan secara intensif sehingga suatu waktu akan muncul keadaan dimana masyarakat setempat bisa mengurus sendiri organisasinya.

Dalam pembentukan kelompok terutama yang bersifat top down seperti yang terjadi pada kasus Gapoktan, agen (depan) mempunyai target jumlah Gapoktan yang harus terbentuk dalam jangka waktu tertentu. Dorongan kejar target sering menjadi alasan pembentukan kelompok yang kurang bermutu, misal saja keanggotaan fiktif, ada nama tetapi orangnya tidak ada. Dalam menyusun rencana definitif kelompok (RDK), nama fiktif diperhitungkan sehingga turun dana kredit untuk nama fiktif tersebut. Demikian seterusnya hingga pencairan kredit, ditandatangani. Uang yang cair tersebut sudah dari awal direncanakan untuk digunakan hal lain, bukan untuk usahatani sesuai dengan peruntukan yang direncanakan dalam rencana kerja kelompok. Terjadilah penyimpangan penggunaan dana, yang berujung pada terjadinya tunggakan kredit.

Dari diskripsi tersebut ditarik kesimpulan sementara bahwa penyaluran kredit melalui Gapoktan bisa terjadi penyimpangan dan karenanya perlu disiapkan dulu kondisi mental petani untuk bisa mengelola dana yang digunakan. Dengan demikian, pemikiran dan orientasi kegiatan yang bersifat mengejar target dan bersifat administrasi proyek kurang efektif dilakukan. Perlu dimunculkan pengelolaan kegiatan yang alamiah, tidak dikarbit, dan berdiri pada akar masalah sesuai dengan kebutuhan pembangunan di perdesaan.

Membangun iklim usaha yang kondusif

Track record koperasi di mata masyarakat yang negatif sebagai kesan sejarah yang ditunjukkan oleh pelaksanaan koperasi sebagai lembaga sosial ekonomi perdesaan menyebabkan masyarakat menjaga jarak dan tidak memilih koperasi sebagai entry point dalam melibatkan dirinya di pasar (Syahyuti, 2005). Di Kalimantan Selatan, sebanyak 40% koperasi berada dalam status masalah⁴, sehingga citra koperasi masih belum cukup kuat untuk menarik minat masyarakat untuk menggunakannya sebagai lembaga ekonomi perdesaan.

Kehadiran koperasi dan Gapoktan dimaksudkan untuk membantu memperjuangkan posisi rebut tawar agar diperoleh harga yang reasonable yang pada gilirannya akan memberikan pendapatan yang lebih tinggi, dirasakan anggota sebagai beban, dimana anggota dipungut iuran wajib dan iuran sukarela serta iuran lainnya yang bersifat insidental. Akibatnya, individu petani lebih cenderung untuk berhubungan dengan rentenir dan candak kulak untuk menjual produknya dan juga untuk mendapatkan pinjaman modal usaha

⁴ Berita radio El Shinta minggu, 21/01/10 jam 11.30

dibandingkan dengan berhubungan dengan koperasi. Kelemahan interaksi ini adalah bahwa nasib ekonomi petani banyak ditentukan oleh keputusan tengkulak, yang sifatnya sepihak dan cenderung eksploitatif. Sebagai gambaran, kredit yang diberikan rentenir ke petani dikenakan bunga yang tinggi yang terkadang petani tidak menyadarinya karena sistem pembayaran yang in natura, satu kuintal beras yang dipinjam pada saat awal musim tanam, dikembalikan menjadi dua kuintal setelah panen, artinya tingkat bunganya 100% dalam empat bulan, 300% se tahun, pada hal tingkat bunga di lembaga perbankan berkisar dibawah 20% per tahun. Petani menerima keputusan tersebut karena tidak ada pilihan lain. Lembaga keuangan perbankan dan non perbankan yang beroperasi dengan tingkat bunga pasar tidak mereka miliki aksesnya baik karena lokasi bank yang jauh dari tempat tinggal mereka, juga karena tidak adanya collateral yang dimiliki petani sebagai syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan kredit. Selama masih didapatnya hasil lebih dari usahanya, petani menerima kredit dengan bunga tinggi. Jika tidak, kesulitan (survival) petani menjadi terancam, karena berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar kehidupan sehari hari. Hal ini bisa dimengerti karena desakan kebutuhan dasar begitu kuat sehingga pertimbangan untung rugi dikesampingkan.

Untuk itu solusinya bisa didekati melalui dua sisi (1) sisi internal dimana petani dituntut dan dibina agar berproduktivitas tinggi sehingga terdapat kelebihan produksi yang bisa ditabung (saving) sehingga terjadi akumulasi modal untuk pengembangan (ekspansi) usaha terutama untuk membeli teknologi dan input produksi untuk meningkatkan mutu dan jumlah produksi; dan (2) dari sisi eksternal yaitu perlunya upaya yang sistematis, dan ajeg untuk menumbuhkan pasar yang kompetitif (bukan yang eksploitatif) baik pasar input dan tenaga kerja, pasar output dan pasar uang. Jadi, iklim usaha yang kondusif merupakan bagian yang tidak terpisahkan didalam memberdayakan Gapoktan sehingga menjadi lebih efektif didalam menjalankan fungsinya.

Dalam meningkatkan efektifitas fungsi Gapoktan, Warsana (2009) menekankan pentingnya pembinaan yang intensif dan mencukupi sampai Gapoktan tumbuh mandiri dan dapat bersaing di pasar. Untuk itu pembentukan Gapoktanawali dengan inventarisir kegiatan yang akan dilakukannya, baru dibentuk disesuaikan dengan kegiatan yang umumnya terdiri dari penyediaan saprotan, penyediaan modal, penyediaan air irigasi, kegiatan usahatani, pengolahan, pemasaran, penyediaan informasi teknologi, penyediaan informasi pasar

Dalam hal petani enggan untuk berhubungan dengan koperasi karena track recordnya yang negatif, maka petani cenderung untuk menggunakan lembaga lain seperti rentenir dan lembaga non formal lainnya untuk mendapatkan kebutuhannya baik untuk kegiatan produksi maupun untuk kegiatan konsumtif. Kelemahan posisi petani secara individu, sangat rentan sehingga mudah di eksploitasi. Pelaku usaha yang tidak kuat dengan nilai

moral, tidak sulit untuk memanfaatkan kesempatan itu untuk berinteraksi dengan petani dengan sifat yang eksploitatif. Petani lemah dalam bargaining dan cenderung menerima saja keputusan dari rentenir, walaupun berpotensi menimbulkan kesulitan di kemudian hari misal terjadi akumulasi utang dikarenakan petani tidak mampu melunasi kredit tepat waktu sehingga perlu diperpanjang dengan prinsip bunga berbunga yang tidak jarang akhirnya petani menjual rumah atau aset lain untuk melunasi hutangnya di rentenir dan tengkulak. Inilah gambaran kasar proses marjinalisasi (pemiskinan) masyarakat kecil sehingga tidak sulit ditemukan petani yang menjadi buruh dibekas ladangnya sendiri⁵.

Solusi untuk kasus ini bisa didekati dengan tiga cara yaitu pertama, membuat piranti (instrumen) hukum yang bisa membatasi dan mengatur hubungan yang berkeadilan dan berkemanusiaan diantara kedua pihak yang terlibat dalam usaha, misalnya ditentukan tingkat bunga maksimum untuk kredit uang dan harga minimum untuk barang panen petani. Empirik menunjukkan bahwa piranti ini sulit jalan dengan efektif karena didalamnya terdapat moral hazard dan sifat 'rakus' sehingga mengenyampingkan nilai etika kemanusiaan. Low enforcement yang rendah diperburuk lagi oleh pengawasan aturan yang lemah sehingga terkesan aturan yang dikeluarkan tidak efektif;

Kedua, membangun lembaga keuangan mikro yang beroperasi secara proaktif di wilayah petani sehingga petani tidak terlibat dalam interaksi dengan rentenir. Faktor faktor kemudahan dan non collateral prinsip merupakan kondisi yang harus diciptakan sehingga petani kebanyakan bisa mendapatkan akses kredit murah dan mudah tanpa mengabaikan aspek pendidikan. Prilaku konsumtif petani yang membelanjakan uang secara tidak ekonomis dan tidak memenuhi prinsip skala prioritas, perlu di masukan sebagai syarat pencaraian kredit sehingga uang yang dikucurkan menjadi lebih efektif dan produktif untuk memperbaiki produktivitas dan pendapatan serta kesejahteraan petani. Untuk itu, pengawasan dilapangan adalah mutlak perlu yang tidak saja menakuti petani untuk tidak berbuat curang dengan ancaman dan hukuman tetapi yang lebih penting adalah menumbuhkan kesadaran petani akan pentingnya manajemen usaha dan finansial yang tepat, guna memperbaiki taraf hidup petani. Karena itu, prinsip reward and punishment lebih banyak diarahkan sebagai instrumen untuk mengefektifkan proses pendidikan petani, membangun kesadaran dan keterampilan untuk meninggalkan praktek yang bersifat subsisten ke yang bersifat modern.

Ketiga, membangun kemitraan vertikal antara Gapoktan dengan stakeholder usaha seperti supermarket dan sejenisnya. Tindakan mengabaikan

⁵ Petani jambu mete di Calabai Dompu NTB, menjual kebun metenya, uangnay digunakan untuk keperluan konsumtif, uang habis, jadilah dia buruh di mantan kebunnya sendiri.,

petani dalam pembangunan adalah tindakan yang keliru. Hal ini bisa dijelaskan sebagai berikut. Sebagian besar masyarakat Indonesia menggantungkan kehidupannya pada sektor pertanian, baik sebagai petani atau profesi lain di sektor pertanian. Di sisi produksi, petani adalah produsen bahan pangan utama dan bahan baku industri, yang dibutuhkan untuk membangun menuju industrialisasi. Untuk itu, mutu dan kontinuitas produksi harus terjamin sesuai dengan kebutuhan industri, dus itu berarti diperlukan petani yang tangguh yang mampu menejahtahkannya dan menerjemahkan kebutuhan industri akan bahan bakunya. Berarti jika segmen masyarakat pertanian tidak diberdayakan, maka berarti kehilangan dua hal sekaligus, (1) mendapatkan bahan pangan dan baku industri yang memenuhi persyaratan mutu dan kontinuitas (2) kehilangan segmen pasar yang besar, yang berarti kerugian besar bagi industri termasuk pangsa pasar ritel. Jadi, terabaikannya penguatan daya beli di segmen pertanian akan merupakan bumerang bagi sektor industri karena cepat atau lambat sektor industri akan mengalami kesulitan pangsa pasar langsung (domestik) dan yang kedua adalah timbulnya kerawanan dan kecemburuan sosial yang menyebabkan tidak adanya jaminan keamanan dalam proses produksi industri. Jika ini disadari, kenapa masih ragu untuk membuat kebijakan yang berpihak pada petani yang nota benenya adalah pasar potensial untuk sektor industri?

Aspek lain yang bisa dipandang sebagai penciptaan iklim usaha yang kondusif adalah upaya yang mengarah ke peningkatan kemampuan petani didalam mendapatkan akses keuangan dan perkreditan. Sehubungan dengan agunan (collateral) yang sering dijadikan syarat dalam permohonan kredit, maka perlu dilakukan registrasi dan sertifikasi lahan sehingga petani bisa memiliki agunan untuk kepentingan kredit. Program nasional (pronas) sertifikasi tanah yang sudah berjalan sejak jaman orde baru perlu diefektifkan kembali dan membenahi sejumlah aspek untuk meningkatkan kinerja prona. Keluhan umum yang dijumpai dilapangan adalah kurangnya sosialisasi dan kontrol pelaksanaan kegiatan tersebut. Sebagian besar petani tidak memiliki akses informasi program sehingga mereka tidak bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk mengurus sertifikat tanahnya.⁶

Closing remark

Sering muncul dipermukaan bahwa konsep yang dipikirkan mapan dengan mempertimbangkan banyak aspek, tidak bisa dijadikan jaminan bahwa konsep pemikiran tersebut akan bisa diterapkan dan diimplementasikan secara efektif. Pada tataran konsep, diupayakan mempertimbangkan faktor faktor yang

⁶ Misal dialami oleh warga Desa Mapak dan sekitarnya di Kecamatan Labu Api Lombok Barat tahun 2007an.

mempengaruhi pencapaian tujuan. Di sisi lain, konsep/teori berupaya untuk menyederhanakan fenomena sehingga lebih mudah dikaji dan dibahas. Akibatnya, banyak konsep yang dihasilkan, menjadi kesulitan dalam tataran impelentasinya, karena terlalu banyak menggunakan asumsi sebagai upaya untuk penyederhanaan kajian.

Konsep koperasi dinilai oleh banyak kalangan sebagai konsep yang cocok untuk diterapkan di Indonesia, karena fungsinya yang ganda yaitu fungsi sosial dan fungsi ekonomi. Seiring dengan perjalanan waktu dan perkembangan pemikiran, belakangan disadari kalau konsep koperasi tidak populer dimasyarakat bahkan banyak masyarakat menghindari menjadikan koperasi sebagai entry point usahanya. Salah satu penjelasnya adalah adanya sikap free rider yang terjadi pada tindakan kolektif koperasi. Alur pikir demikian juga berlaku untuk kasus Gapoktan .

Akhirnya, keberhasilan impelemntasi kebijakan ini akan banyak tergantung pada good will dan komitmen yang kuat dari semua pihak (stake holders) terutama dari pihak pemerintah yang mengendalikan kekuasaan di negara ini.

Reference

- Badan Litbang Pertanian. 2005. Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 2005 – 2025. Dalam: <http://www.litbang.deptan.go.id/rppk>, 25 oktober 2005.
- Booth, D. 2002. Poverty Reduction And National Policy Process. In Handbook On Development Policy And Management. Edited By Colin Kirkpatrick, Ron Clarke, Charles Polidano. Edward Elgar Publishing, Inc. USA.
- Delis, A. 2008. Peran infrastruktur sebagai pendorong dinamika sektoral dan regional berbasis pertanian, Disertasi S3 pada Major Ilmu Ekonomi Pertanian Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor
- Deptan. 2006. Bahan Rapat Kerja Deptan Dengan DPD-RI, Tanggal 19 Juni 2006. Deptan, Jakarta.
- Erwidodo. 2004, Analisis Harga Dasar Pembelian Gabah Dan Tarif Impor Beras, Makalah Disiapkan Dalam Kerangka Food Policy Supportt Activities (FPSA)
- Garsoni, S. 2010. Kendalikan Gejolak Harga Beras, Terapkan Sistim Resi Gudang. Harian Pikiran Rakyat.com. Minggu 24 Januari 2001.

Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor:
16/Permentan/OT.140/2/2008

- Mathari, R. 2008. Carrefour Mulai Masuk Kampung, Rusdi goBlog
- Myles, GD 2001. Public Economics. Cambridge University Press, New York.
- Nicholson, W. 2007. Microeconomic Theory: Intermediate Principles and Extensions, ninth edition. South-Western, Thomson, Canada.
- Philip Blond. 2008 `The Failure Of Neo Liberalism`. Herald Tribune Edisi 23 Januari 2008.
- Saragih, B. 1997. Tantangan Dan Strategipengembangan Agribisnis Di Indoneisa. Jurnal Agribisnis, Volume 1 & 2, Jan-Jun & Jul-Des 1997
- Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian. 2006. Sambutan Dalam Acara Apresiasi Wartawan Di Balai Pendidikan Dan Latihan Hortikultura, Lembang, Bandung, Jawa Barat.
- Sinaga, BM. 2009. Catatan Kuliah MK Ekonometrika Lanjut. EPN SPs IPB Bogor.
- Syahyuti. 2007. Kebijakan Pengembangan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Sebagai Kelembagaan Ekonomi Diperdesaan' Pusat Analisis Sosial Ekonomi Dan Kebijakan Pertanian Bogor Dalam .Analisis Kebijakan Pertanian. Volume 5 No. 1, Maret 2007 : 15-35
- Usman, A. 2004. Bench Mark Socio-Economic Survey Of JIFPRO Planting Project, Collaboration Between Forest Resource Study Centre (PKSK) Agricultural Faculty, Mataram University With Japan International Forestry Promotion And Cooperation Center (JIFPRO).
- Usman, A. 2009. Neolib. Makalah Disampaikan Pada Seminar Forum Pascasarjana IPB. Fri 08/06/09
- Usman, A., Agustina, K., Faizah, R., Siradjuddin SN., Dan Dessy 2009. Potret Kemiskinan Dan Strategi Penanggulangannya Dalam Dokumentasi Perjalanan, International Roundtable Discussion (Ird) Forum Wacana Sekolah Pasca Sarjana IPB Tahun 2009. Bogor

Warsana. 2009. Masalah dalam pematapan kelembagaan. Tabloid Sinar Tani, 8 April 2009